



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT. BINA SILVA NUSA  
KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
  - b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
  - c. Telpn : 021-8844934
  - d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com  
ims@intimultimasertifikasi.com
  - e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
  - f. Tim Audit : 1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Lead/ Auditor Sosial)  
2. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. Indarjo (Auditor Produksi)  
4. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)  
5. Mansur, A.Md (Auditor VLK)
  - g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HT : PT. BINA SILVA NUSA**
- 1. SK IUPHHKA HT : NO. SK. 286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007
  - 2. Luas Areal : ± 9.270 Ha
  - 3. Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
  - 4. Alamat Kantor : Jl. Arteri Supadio Komp. Villa Ceria Lestari No. 1 Pontianak
  - 5. Telpn : 0561 – 581416/ 581419 Fax : 0561 - 581417
  - 6. **Pengurus** :
    - Komisaris Utama : Mochamad Tabi'i
    - Komisaris : Lesmina Tandra
    - Komisaris : Nelly Agus
    - Direktur Utama : Rafliis
    - Direktur Operasional : Ateng Surya Sandjaya
    - Direktur Keuangan : Yanto
    - Direktur Perencanaan dan Produksi : Ir. Fairus Mulia
  - 7. Nomor SPHPL : IMS-SPHPL-009/ REV-1
  - 8. Masa Berlaku SPHPL : 16 Desember 2013 – 15 Desember 2018

### I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 November 2015 - BPPHP Wilayah X Pontianak - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
2	Pertemuan Pembukaan (entry briefing)	24 November 2015 (Camp Sungai Keluang, PT. BSN)	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Entry Briefing
3	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 30 November 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan</li> <li>2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.</li> <li>3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.</li> <li>4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.</li> <li>5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab</li> <li>6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria</li> </ol>
4	Pertemuan Penutup Exit Briefing	30 November 2015	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak</li> <li>2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan</li> <li>3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan</li> <li>4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara exit briefing</li> </ol>
5	Pengambilan Keputusan	30 Desember 2014	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

## II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

### 2.1 Resume Hasil Penilaian PHPL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1.1 BAIK (3)	1.1.1	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas sebagaimana telah disebutkan pada hasil penilaian Penilikan I PHPL PT BSN tahun 2014 tersedia lengkap di lapangan, pada tahun 2015 mengalami penambahan dokumen berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2015 sebagai dokumen legal pengelolaan hutan tanaman tahun 2015. Begitu pula administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas, dan dibuktikan dengan terbitnya dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalbar.
	1.1.2	Baik	Realisasi pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN adalah sepanjang 41.067 meter dari rencana 40.916 meter, dengan hasil lebih panjang 151 meter. Berdasarkan hasil tata batas tersebut, menunjukkan bahwa realisasi tata batas areal kerja PT BSN telah dilaksanakan 100% (temu gelang). Luas definitif areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, maka luas areal kerja definitif IUPHHK-HTI PT BSN adalah 9.270 Ha.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.1.3	Baik	Sebagaimana hasil Penilikan I PHPL PT BSN tahun 2014, hasil Penilikan II tahun 2015 menunjukkan bahwa keberadaan IUPHHK-HTI PT BSN telah mendapatkan pengakuan dari para pihak, baik pengakuan dari pihak pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT BSN maupun dari masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya letak dan luas areal kerja definitif PT BSN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat). Disamping itu, pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik batas areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN dengan pihak lain baik dengan Perusahaan lain yang berbatasan langsung maupun masyarakat desa sekitar.
	1.1.4	N/A	Tidak ada perubahan fungsi kawasan
	1.1.5	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, hal ini artinya tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) di dalam kawasan hutan produksi (dalam hal ini areal kerja IUPHHK-HTI PT. BSN) yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. BSN yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dasar hal tersebut, maka penilaian kinerja terhadap verifier ini tidak dilakukan ( <b>Not Applicable/NA</b> ).
1.2 SEDANG (2)	1.2.1	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT BSN yang ditandatangani oleh Direksi PT BSN pada tanggal 10 Maret 2002. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu pengelolaan hutan tanaman secara profesional yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial.
	1.2.2	Sedang	Sosialisasi visi dan misi PT BSN telah dilakukan namun hanya kepada internal karyawan PT BSN sedangkan kepada masyarakat tidak dilakukan. Terdapat bukti pelaksanaan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.2.3	Sedang	Sebagian besar, kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT BSN tahun 2014 – 2015 telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Tetapi ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut, diantaranya pemenuhan GANIS PHPL belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beberapa dokumen Prosedur Standar Operasional (PSO) belum sesuai dengan ketentuan teknis dan karakteristik wilayah setempat, sebagian program K3 belum diimplementasikan di lapangan.
1.3 SEDANG (2)	1.3.1	Sedang	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT BSN bidang kehutanan tahun 2015 di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan belum memenuhi syarat kecukupan jumlah sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yaitu kekurangan GANIS PHPL sebanyak 4 (empat) orang yaitu GANIS PHPL-TC, GANIS PHPL-PWH, GANIS PHPL-Binhut dan GANIS PHPL-KELING. Untuk sementara bidang kegiatan yang masih belum tersedia GANIS PHPL, bidang yang dimaksud ditangani oleh Sarjana Kehutanan dan SDM/karyawan yang berpengalaman sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
	1.3.2	Sedang	Realisasi peningkatan SDM PT BSN pada periode Penilikan II berupa pengikut sertaan dalam pendidikan dan latihan maupun inhouse training adalah sebesar 66,67 %.
	1.3.3	Baik	Hasil Penilikan II tahun 2015 menunjukkan bahwa dokumen ketenagakerjaan PT BSN tersedia lengkap, antara lain dokumen Peraturan Perusahaan PT BSN no. 47/ADM/HRD/III/2015 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya No. KEP/391/PHI/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT BSN, dokumen Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja tahun 2015, dokumen usulan promosi, perpanjangan kontrak dan penyesuaian gaji karyawan, kartu

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			peserta jamsostek untuk karyawan, dokumen/formulir perhitungan iuran bulanan program Jamsostek, pendaftaran tenaga kerja pada program Jamsostek dan rincian iuran tenaga kerja lapangan/harian lepas program Jamsostek tahun 2014 dan terdapat Struktur organisasi dan job deskripsi PT BSN.
1.4 SEDANG (2)	1.4.1	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditetapkan dalam dokumen Prosedur Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Jabatan, dengan nomor register BSN/PK-PRA/01. Dari kaca mata PHPL Struktur Organisasi yang ada saat ini terlihat mengalami penurunan dibanding sebelumnya khususnya berkaitan dengan kerangka PHPL. Sebagaimana diketahui bahwa kelestarian yang dimaksudkan dalam PHPL meliputi kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial, dalam Struktur Organisasi pada saat ini bagian lingkungan dan sosial berada dibawah Asisten Bidang Pembinaan HTI dan Personalia.
	1.4.2	Baik	Sesuai dengan hasil audit Penilikan II PHPL PT BSN tahun 2015, bahwa tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT BSN baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/ <i>software</i> maupun tenaga pelaksananya yang tersebar dalam berbagai posisi dan bidang kegiatan pengelolaah hutan tanaman.
	1.4.3	Sedang	Sesuai dengan hasil audit sertifikasi PHPL PT BSN tahun 2014, bahwa tersedia unit SPI/ <i>internal auditor</i> dalam struktur organisasi tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.4.4	Sedang	Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, dilakukan manajemen PT BSN dengan cara menyusun Prosedur Standar Operasional (PSO) pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Manajer Camp PT BSN secara langsung setiap hari kerja melalui kegiatan pertemuan rutin dalam lingkup bidang masing-masing. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat lapangan menemukan kendala/permasalahan di lapangan. tetapi tindakan perbaikan yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi terutama temuan ketidaksesuaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh SPI beberapa diantaranya belum dilakukan perbaikan dan belum ada rencana target waktu untuk perbaikan tersebut.
1.5 BAIK (3)	1.5.1	Baik	Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT BSN tahun 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2015 yang telah disahkan. Berkaitan dengan alokasi tanaman kehidupan yang merupakan hak masyarakat setempat, sebagaimana hasil penilikan I kinerja PHPL PT BSN tahun 2014, menunjukkan bahwa telah terjalin kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan antara PT BSN dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Desa Betuah Kecamatan Terentang, dengan No. 02/BSN-SPK/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 dan Pernyataan Kesepakatan bersama bagi hasil tanaman kehidupan yang ditandatangani pada 1 April 2015.
	1.5.2	Baik	Proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT BSN telah melibatkan para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan perusahaan-perusahaan disekitar yang batas arealnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara tanggal 24 November 2009, Tentang pelaksanaan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			<p>pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN dengan PT Sari Bumi Kusuma di Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, proses penataan batas areal kerja PT BSN telah selesai dilaksanakan seluruhnya (temu gelang) dan telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.</p>
	1.5.3	Sedang	<p>Proses penyusunan program CSR/CD PT BSN dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman baik jangka panjang (RKUHHK-HTI), jangka pendek (RKTUPHHK-HTI) maupun dokumen tahunan (Rencana Operasional). Dokumen tersebut telah disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan baik jajaran manajemen PT BSN, pejabat yang berwenang (pemerintah). Pada pelaksanaan CSR 2015 masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR.</p>
	1.5.4	Baik	<p>Proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT BSN dituangkan dalam dokumen baik Deliniasi Mikro, dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Dokumen perencanaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (pemerintah). Pada pelaksanaannya, Direksi IUPHHK-HTI PT BSN menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BSN No. 194/BSN-A3/VIII/2010 tentang penetapan kawasan lindung di areal PT BSN tanggal 1 Agustus 2010. Disamping itu, telah dilaksanakan kegiatan penilaian <i>Hight Conservation Value Forest (HCVF)</i> yang dalam beberapa tahapan penilaian tersebut baik pada awal pelaksanaan (rencana) maupun akhir pelaporan penilaian, dilakukan konsultasi publik yang melibatkan seluruh pihak (<i>stake holder</i>) baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun masyarakat sekitar. Menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, Auditee telah mengalokasikan kawasan lindung di dalam areal kerjanya yang</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT BSN yang baru (revisi).
2.1. Baik (3)	2.1.1.	Baik	PT BSN telah melakukan revisi RKT pada bulan 18 Desember 2014. Mendapat surat dari Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No. SK 63/VI-BUHT/2014, tentang persetujuan RKUPHHK-HTI periode tahun 2009 – 2018 an. PT BSN. Telah dibuat deliniasi mikro untuk menyusun rencana penataan ruang.
	2.1.2	Baik	Implementasi penataan areal kerja untuk daur pertama ( th 2009 – 2013) adalah rencana luas tanaman pokok 6.500 ha,realisasi 6.050 ha. Untuk tanaman unggulan 900 ha,realisasi 765 ha, dan untuk tanaman kehidupan 450 ha,realisasi 450 ha. Terdapat kesesuaian tentang lokasi blok RKT 2015 dalam peta RKT 2015 dengan peta revisi RKT. PT BSN melaksanakan penataan blok dan petak dilapangan. Batas blok dan petak dibuat kanal, dipasang papan nama, pal dan kanal dibersihkan/dipelihara. Batas batas tersebut telah sesuai dengan rencana kerja dalam peta RKT.
	2.1.3.	Sedang	Pemeliharaan batas/kanal dimaksudkan untuk persiapan pemanenan pada Petak yang bersangkutan sebagai jalur pengangkutan kayu dengan menggunakan bis air/rakit dan dalam rangka pemeliharaan. Tanaman sampai dengan umur 4 tahun dilakukan pemeliharaan secara intensif,termasuk pemeliharaan kanal sebagai sarana transportasi. Sehingga batas blok/petak berupa kanal terlihat jelas dilapangan. Namun ada sebagian papan nama batas blok/petak yang sudah rusak seperti papan batas dengan KPPN, papan nama blok RKT 2015/2016 dan sebagian papan nama batas petak.
2.2. BAIK (3)	2.2.1	Baik	PT BSN untuk tahun 2015 telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil survei potensi/cruising/ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya. Peta berupa peta RKT 2015, dimana petak tebangan sebanyak 14 petak sesuai dengan yang ada dalam peta tersebut. Untuk rencana tebangan tahun 2016, diketahui potensi tegakan hutan tanaman untuk RKT 2016 adalah 59,84 m <sup>3</sup> /ha. Total rencana volume tebangan tahun 2016 adalah 66.178,76 m <sup>3</sup> .

	2.2.2	baik	PT BSN telah melakukan pengamatan terhadap riap pertumbuhan tanaman, berdasarkan hasil perhitungan monitor perkembangan tanaman. Maka telah tersedia data tentang riap pertumbuhan tanaman pada kondisi masak tebang, yaitu pada saat tanaman berumur 6 tahun sebesar 120,46 m <sup>3</sup> /ha/tahun.
	2.2.3	sedang	PT BSN telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk tahun terakhir dan menyampaikan laporannya. Untuk jatah tebang tahunan berdasarkan hasil cruising (ITSP), jatah tebang tahunan tahun 2016 adalah sebesar 66.178,76 m <sup>3</sup> .
2.3 Sedang	2.3.1.	Baik	Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa sebagian SOP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan teknis mengenai Hutan Tanaman (areal PT BSN). Antara lain pada SOP PWH bahwa pembahasan/prosedur mengenai kanal yang merupakan jalan utama lalu lintas kegiatan HT tidak dibuat, SOP banyak membahas mengenai jalan ongkang. Dan dalam SOP penebangan ramah lingkungan bahwa dalam penataan zona disebutkan mengenai cagar budaya dan hutan lindung serta dalam penebangan memuat penebangan pohon besar berbanir dll.
	2.3.2	Baik	PT BSN telah melaksanakan tahapan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan dari mulai PAK, ITSP, PWH, Pemanenan ramah lingkungan, pembangunan hutan tanaman, pengadaan benih dan pemanenan kayu bulat kecil.
	2.3.3.	sedang	Potensi tahun 2014 sebesar <b>92,75m<sup>3</sup>/ha</b> , potensi tahun 2015 sebesar <b>67,93m<sup>3</sup>/ha</b> , potensi tahun 2016 sebesar <b>59,84 m<sup>3</sup>/ha</b> , dan potensi RKT 2016 dari pengamatan litbang sebesar <b>67,66 m<sup>3</sup>/ha</b> . Berdasarkan wawancara dengan Asisten Bidang Litbang Nur Syarif, S.Hut dan berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa potensi tegakan hutan tanaman siap tebang di RKT 2015 dan 2016 rendah dibanding potensi RKT tahun 2014. Hal ini karena tempat tumbuh blok RKT 2015 dan 2016 kadar gambutnya tinggi (60%), sehingga pertumbuhan tanaman <i>Acacia mangium</i> tidak maksimal.
	2.3.4	sedang	PT BSN telah melakukan pengamatan terhadap potensi tegakan /permudaan per triwulan oleh divisi litbang dan bagian PHTI pada Bulan Maret 2015. Hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa prosen hidup tanaman di blok RKT 2018 dan RKT 2017 masing masing adalah sebesar 88,00% dan 77,79%.

2.4 Sedang (2)	2.4.1	sedang	Dalam penataan zona disebutkan mengenai cagar budaya dan hutan lindung serta dalam penebangan memuat penebangan pohon besar berbanir dll, menunjukkan karakter yang berbeda dengan kondisi areal IUPHHK-HT PT BSN. Hasil telaah terhadap dokumen ini menunjukkan bahwa pembahasan/prosedur mengenai kanal yang merupakan jalan utama lalu lintas kegiatan HT tidak dibuat, SOP banyak membahas mengenai jalan ongkak.
	2.4.2	sedang	PT BSN telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dari tahap perencanaan, pemanenan, pemeliharaan dan K3 serta paska pemanenan. Terdapat kanal, papan nama, perawatan kanal. Kegiatan penebangan dengan limbah minimal karena tonggak sampai dengan batas bawah. Terdapat camp tebangan, alat angkut kayu, ponton. Tersedia air bersih, pembuangan limbah, fasilitas tambahan dan perlengkapan standard minimal keselamatan kerja. Dalam kegiatan paska pemanenan terdapat penyiapan lahan, pemasangan ajir, mutasi bibit, penanaman dan terdapat penanaman rehabilitasi. Namun kegiatan yang berkaitan dengan K-3 tidak tersedia pelampung, dan SOP RIL belum ada revisi.
	2.4.3	baik	Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa faktor eksploitasi $\geq 70\%$ , hal ini karena penebangan dilakukan secara efektif dimana rata-rata tunggak yang ditinggalkan setinggi $\pm 10$ cm dan pemanfaatan batang sampai dengan diameter $\pm 5$ cm. sehingga dapat meminimalkan limbah yang ditimbulkan. Uji petik pengamatan di petak 57, RKT 2015. ( $00^{\circ}32'22,4''$ LS ; $109^{\circ}47'51,0''$ BT); petak 83, ( $00^{\circ}33'08,3''$ LS ; $109^{\circ}50'29,9''$ BT). Di petak tersebut terdapat tumpukan batang kayu kecil dan tonggak bekas tebangan yang rata dengan permukaan tanah.
2.5 BAIK (3)	2.5.1	baik	Rencana dalam RKT 2015 sama dengan dalam dokumen revisi RKU, yaitu rencana pemanenan, pengadaan bibit dan penanaman. RKT 2015 dan Revisi RKU telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Maka PT BSN telah mempunyai rencana jangka pendek RKT 2015 yang sah dan disusun berdasarkan RKU.

	2.5.2	baik	Hasil overly peta kerja RKT 2015 dengan peta Revisi RKU terdapat kesesuaian. Jumlah petak dalam peta RKT 2015 adalah sama dengan di peta revisi RKU yaitu 14 petak. No petak 57-58, 67-71, 79-85. Lokasi masing masing petak sama, lokasi kawasan dilindungi sama dan sarana prasarana juga sama. Maka terdapat peta kerja/peta RKT 2015 sesuai dengan peta lampiran di dokumen revisi RKU.
	2.5.3	sedang	PT BSN telah mengimplementasikan penandaan peta kerja di lapangan. Berupa penandaan sarana prasarana Camp, TPK, Persemaian. Penandaan blok, petak, batas kawasan lindung KPPN. Secara umum kondisi lapangan terlihat jelas, namun ada beberapa tanda yang rusak belum diperbaiki, seperti papan KPPN, papan blok RKT 2016 tanaman kehidupan, papan nama TPK.
	2.5.4.	baik	Realisasi produksi tahun 2014 adalah sebesar 74,7%, dan realisasi luas tebang 2014 sebesar 137,9%. Untuk realisasi luas tebang tahun 2014 melebihi target (100%), karena pada tahun 2014 terjadi musibah angin dan terserang hama penyakit, sehingga ada tambahan tebang seluas 381 ha.
2.6 Sedang (2)	2.6.1	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT BSN pada tahun 2013 adalah tingkat likuiditas sebesar 224,64%, atau nilainya diatas 100%, artinya perusahaan mampu melunasi hutang hutangnya dalam jangka pendek. Tingkat solvabilitas 146,95%, dimana nilainya juga diatas 100%. Artinya apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu melunasi hutang hutangnya dalam jangka panjang. Namun nilai rentabilitasnya negatif (-4,64%).
	2.6.2	Baik	PT BSN telah menyusun rencana anggaran pembangunan hutan tanaman pada tahun 2013 yang tertuang dalam dokumen RKAP 2013. Rencana anggaran tersebut adalah sebesar Rp10.389.040.950,-. Rencana anggaran ini diluar rencana anggaran pemanenan. Dari laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik tahun 2013 diketahui bahwa realisasi anggaran pembangunan hutan tanaman PT BSN sebesar Rp8.438.815.206,-. Jadi prosentase realisasi anggaran pembangunan hutan tanaman tahun 2013 sebesar 81,23%. Dengan realisasi 81,23% maka tingkat kecukupannya di atas 80%.

	2.6.3	Buruk	Ada beberapa pos kegiatan yang tidak proporsional, karena terjadi simpangan diatas 50%. Yaitu kegiatan perencanaan terjadi simpangan sebesar 86,91%, kegiatan pengembangan (Litbang) terjadi simpangan sebesar 95,06%. Maka dikatakan realisasi anggaran tahun 2013 tidak proporsional.
	2.6.4	Sedang	Prosentase realisasi fisik pembinaan yang dilakukan oleh PT. BSN pada tahun 2014 sebesar <b>89,87%</b> . Realisasi fisik pengadaan bibit tahun 2014 adalah sebesar 77,11%, realisasi penanaman tahun 2014 adalah sebesar 79,40%. Realisasi produksi tahun 2014 adalah sebesar 74,70%. Kalau mengacu dari realisasi fisik penanaman dan realisasi produksi yang dilakukan PT.BSN tahun 2014 dalam katagori baik, namun belum 100%, maka bisa diketahui bahwa realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PT.BSN adalah lancar, tetapi belum sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5	Sedang	Diketahui bahwa rencana anggaran penanaman, pemeliharaan yang tertuang dalam RKAP tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.897.853.800. Dalam laporan keuangan tahun 2013 realisasi anggaran penanaman, pemeliharaan sebesar Rp 4.270.885.485,-. Maka prsentase realisasi anggaran penanaman, pemeliharaan tahun 2013 sebesar 87,20%.
	2.6.6.	Baik	Realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2014 sebesar 89,87%.
3.1 Baik (3)	3.1.1	Baik (3)	Jenis dan luas kawasan lindung mengalami perubahan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 63/VI-BUHT/2014 dan telah sesuai dengan dokumen perencanaan perusahaan, selain itu kawasan lindung sesuai dengan kondisi biofisiknya
	3.1.2	Baik (3)	Berdasarkan hasil telaahan dokumen Laporan Penataan kawasan lindung dan hasil verifikasi lapangan serta hasil wawancara, realisasi penataan batas kawasan lindung telah mencapai 100% dari seluruh luas kawasan lindung (1.482 ha).
	3.1.3	Sedang (2)	Berdasarkan hasil delinasi peta citra satelit yang tersedia, kawasan lindung PT. BSN yang masih berhutan seluas 917 ha atau 61,87 % dari total luas kawasan lindung. Terdapat penurunan persentase penutupan kawasan lindung dikarenakan terdapat penambahan luas areal kawasan lindung.

	3.1.4	Baik (3)	Para pihak (Pemerintah, Manajemen PT. BSN dan masyarakat sekitar areal) telah mengakuan keberadaan dan arti penting kawasan lindung PT. BSN. Pengakuan ini dikuatkan oleh bukti-bukti seperti disahkannya dokumen perencanaan perusahaan oleh pemerintah, pengukuhan kawasan lindung oleh perusahaan dan dokumen sosialisasi tata ruang termasuk kepada masyarakat kampung termasuk kawasan lindung.
	3.1.5	Baik (3)	Implemetasi pengelolaan kawasan lindung selama periode waktu 1 tahun ini telah disusun kedalam beberapa dokumen laporan pengelolaan.
3.2 Sedang (2)	3.2.1	Baik (3)	Dokumen SOP yang tersedia tidak mengalami revisi dan tidak ada penambahan prosedur baru. Dengan demikian PT. BSN telah memiliki dokumen prosedur kerja perlindungan hutan sesuai dengan gangguan yang ada.
	3.2.2	Sedang (2)	PT. BSN telah memiliki sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan dan ketersediaanya telah disesuaikan dengan potensi gangguan yang ada. Akan tetapi, sebagian dari sarana prasana tersebut kurang mendukung upaya pengamanan hutan dikarenakan sudah tidak layak lagi dan tidak tersedia (seperti menara pemantau kebakaran).
	3.2.3	Sedang (2)	Berdasarkan verifikasi keberadaan tenaga profesional, PT. BSN telah memiliki GANIS BINHUT 1 orang dan GANIS KESOS 1 orang serta karyawan dengan kualifikasi sarjana kehutanan/berpengalaan sebanyak 1 orang. Dengan demikian, PT. BSN masih membutuhkan 1 orang lagi dengan kualifikasi GANIS BINHUT atau GANIS KELING atau sarjana kehutanan atau tenaga berpengalaman yang diberdayakan pada bidang Pembinaan Hutan.
	3.2.4	Sedang (2)	Tindakan pengamanan hutan selama rentang waktu 1 tahun terakhir dilakukan dengan tindakan <i>preemptif/ preventif/represif</i> terhadap potensi gangguan yang ada, akan tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan gangguan kebakaran hutan seperti pemantauan dini kebakaran hutan, sehingga permintaan CARs tahun 2014 belum terpenuhi.

3.3 Sedang	3.3.1	Baik (3)	PT. BSN telah memiliki dokumen prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak cukup lengkap yaitu : SOP RIL, SOP Pembukaan Wilayah Hutan, SOP Konservasi Tanah dan Air di Lahan Gambut dan SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	3.3.2	Baik (3)	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak yang tersedia ini tersedia cukup lengkap baik jenis maupun jumlahnya dan kondisinya masih baik dan mendukung tindak kelola dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
	3.3.3	Sedang (2)	Berdasarkan verifikasi keberadaan tenaga profesional, PT. BSN telah memiliki GANIS BINHUT 1 orang dan GANIS KESOS 1 orang serta karyawan dengan kualifikasi sarjana kehutanan/berpengalaman sebanyak 1 orang. Dengan demikian, PT. BSN masih membutuhkan 1 orang lagi dengan kualifikasi GANIS BINHUT atau GANIS KELING atau sarjana kehutanan atau tenaga berpengalaman yang diberdayakan pada bidang Pembinaan Hutan.
	3.3.4	Sedang (2)	PT. BSN telah menyusun dokumen RKL dan RPL. Implementasi kelola dampak belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Indikasi pencemaran lingkungan oleh bahan tertentu masih ditemukan seperti : pencemaran air oleh BBM, sisa pemanenan (tong) dan limbah sisa kegiatan penanaman.
	3.3.5	Sedang (2)	PT. BSN memang telah melakukan pemantauan dampak lingkungan khususnya dampak terhadap tanah dan air. Akan tetapi data-data hasil pemantauan tersebut belum tersaji dengan baik untuk dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan pemantauan telah dilakukan secara menyeluruh terhadap komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak.
	3.3.6	Sedang (2)	Hasil pemantauan dampak masih belum semuanya tersaji, data yang belum tersaji antara lain : konsistensi tanah, permeabilitas, kandungan BO, subsidensi dan lain-lain, dengan demikian dampak kegiatan pengelolaan hutan belum diketahui dengan secara utuh. Sehingga CARs yang diminta pada tahun 2014 belum terpenuhi.

3.4 Baik	3.4.1	Baik (3)	Dokumen SOP yang ada tidak mengalami revisi dan tidak ada penambahan prosedur baru terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. SOP yang ada telah mencakup prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang ada didalam areal PT. BSN dan status perlindungannya
	3.4.2	Baik (3)	PT. BSN telah menyusun potensi data identitas flora fauna yang di arealnya berdasarkan status perlindungan dan kerawanannya berdasarkan appendiks CITES terbaru.
3.5 Baik (3)	3.5.1	Baik (3)	PT. BSN telah memiliki dokumen prosedur pengelolaan flora dan habitatnya. Dokumen-dokumen tersebut sebagian besar telah cukup jelas, mudah diterjemahkan, memenuhi aspek legal dokumen dan telah disesuaikan dengan peraturan yang ada.
	3.5.2	Baik (3)	Rencana kelola flora dituangkan dalam dokumen RKL-RPL PT. BSN tahun 2003. Implementasi pengelolaan selama kurun waktu 1 tahun terakhir dilakukan terhadap habitat maupun spesies berupa upaya perlindungan, identifikasi jenis dan NKT dan lain-lain.
	3.5.3	Baik (3)	Gangguan yang mengancam kondisi suatu spesies tetap ada dalam skala yang relatif kecil. Antisipasi PT.BSN terhadap gangguan tersebut dengan penyediaan SOP, penyediaan sarana prasarana dan organisasi perlindungan gangguan hutan. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic di areal kerja PT. BSN relatif terjaga. Antara lain dikarenakan PT. BSN dalam beraktivitas menerapkan sistem ramah lingkungan dan lokasi arealnya yang jauh dari aktivitas masyarakat.
3.6 Baik (3)	3.6.1	Baik (3)	PT. BSN telah menyusun dokumen SOP yang cukup lengkap dan baik, dan tidak ada penambahan dan revisi dokumen-dokumen tersebut.
	3.6.2	Baik (3)	Rencana kelola fauna dituangkan dalam dokumen RKL-RPL PT. BSN tahun 2003. Implementasi pengelolaan selama kurun waktu 1 tahun terakhir dilakukan terhadap habitat maupun spesies berupa upaya perlindungan, identifikasi jenis dan NKT dan lain-lain.



	3.6.3	Baik (3)	<p>Gangguan yang mengancam kondisi suatu spesies tetap ada dalam skala yang relatif kecil. Antisipasi PT.BSN terhadap gangguan tersebut dengan penyediaan SOP, penyediaan sarana prasarana dan organisasi perlindungan gangguan hutan.</p> <p>Kondisi yang mendukung kondisi fauna tetap terjaga adalah lokasi yang cukup jauh dari aktivitas masyarakat sekitar, sehingga perburuan satwa liar jarang terjadi. Hasil analisa INP terkahir (tahun 2015) menyimpulkan bahwa kondisi rona awal dengan dengan kondisi saat ini relatif stabil.</p>
4.1 Baik (3)	4.1.1	baik	PT BSN telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan pada tahun 2014. IUPHHK-HT telah menyusun dokumen rencana pemanfaatan SDH yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat setempat berupa RKUPHHK periode 2009-2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan RKT 2015 yang disahkan secara <i>self approval</i> .
	4.1.2	baik	Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Kegiatan operasional IUPHHK selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015) tidak menimbulkan konflik batas kawasan dengan masyarakat sekitar.
	4.1.3	baik	Tersedia 7 (tujuh) mekanisme yang legal dan telah mencakup seluruh pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yaitu SOP Identifikasi Hak Tradisional Masyarakat, SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial Terhadap Masyarakat, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Ke Dalam Hutan, SOP Penilaian Dampak Sosial Pedesaan, SOP Proses Perjanjian, SOP Suplai Logistik Dari Masyarakat, dan SOP Penerimaan Tenaga Kerja.
	4.1.4	baik	PT BSN telah melakukan tata batas seluruh areal kerjanya dan tidak terdapat kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, sumber HHNK, dll.) dalam areal kerja PT BSN.
	4.1.5	baik	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN berupa dokumen BATB No. 1506 tahun 2010, SK Menhut No. 473/MENHUT-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Berita Acara Sosialisasi Pemeliharaan Batas Areal Kerja PT BSN tahun 2015.

4.2 SEDANG (2)	4.2.1	baik	PT BSN telah memiliki dokumen legal menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan berupa RKL RPL 2003, RKUPHHK periode 2009-2018, RKTUPHHK tahun 2015 dan Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial tahun 2015.
	4.2.2	baik	Tersedia 5 (lima) mekanisme yang telah mencakup seluruh pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yaitu SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial Terhadap Masyarakat, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Ke Dalam Hutan, SOP Suplai Logisik Dari Masyarakat, SOP Penerimaan Tenaga Kerja, dan SOP Peningkatan Peran Serta Dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat.
	4.2.3	Sedang	PT BSN telah melakukan kegiatan sosialisasi batas areal kerja IUPHHK dengan areal garapan masyarakat di Dusun Teluk Mentuah, Desa Teluk Beringin. Namun kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap Desa Betuah sebagai salah satu desa binaan PT BSN.
	4.2.4	Sedang	PT BSN telah merealisasikan sebagian kegiatan kelola sosial yang direncanakan pada tahun 2015 meliputi pelibatan tenaga kerja lokal sebanyak 125 orang (64,43%) dan bantuan hari besar negara dan agama.
	4.2.5	Sedang	Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin berupa Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial 2015, Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II tahun 2014 dan semester I 2015, Kontrak Kerja dengan mitra dalam kegiatan perusahaan HTI, namun belum diperoleh bukti-bukti realisasi kegiatan kelola sosial secara rinci meliputi besarnya biaya, lokasi, dan waktu pelaksanaan.
4.3 SEDANG (2)	4.3.1	Sedang	Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat sekitar berupa: a) Laporan “Penerapan Program Sosial Terhadap Masyarakat di Sekitar dan di Dalam Areal Konsesi oleh Perusahaan Konsesi Hutan Bersertifikat PT Bina Siva Nusa, Nopember 2014 dan b) Laporan Penggunaan Tenaga Kerja, Oktober 2015, terdapat tenaga kerja lokal sebanyak 64,43%. Namun demikian belum tersedia data masyarakat setempat yang mencari ikan di dalam areal kerja dan bertani/berkebun di sekitar areal kerja.

	4.3.2	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa: SOP Peningkatan Akses Masyarakat Ke Dalam Hutan, SOP Suplai Logisik Dari Masyarakat, SOP Penerimaan Tenaga Kerja, dan SOP Peningkatan Peran Serta Dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat.
	4.3.3	baik	PT BSN telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa RKL RPL 2003, RKUPHHK periode 2009-2018, RKT 2015 dan RO Kelola Sosial 2015.
	4.3.4	Sedang	Program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar sebanyak 7 (tujuh) kegiatan telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan (42,86%) yaitu pelibatan tenaga kerja lokal, pelibatan kontraktor lokal dalam kegiatan operasional HTI, dan pembelian hasil pertanian dan ikan dari masyarakat sekitar secara rutin.
	4.3.5	Sedang	Terdapat bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial 2015, Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Bulan Oktober 2015, Bukti setor PSDH periode Nopember 2014 s.d Oktober 2015. Namun laporan kelola sosial 2015 belum lengkap & jelas. Selain itu belum ada bukti pembayaran PBB tahun 2015.
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan telah secara detil menguraikan tahap-tahap resolusi konflik berupa identifikasi konflik, pengembangan prosedur penyelesaian konflik, dan manajemen konflik melalui upaya perundingan atau musyawarah.
	4.4.2	Baik	Tidak terdapat konflik selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015).
	4.4.3	Baik	PT BSN telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang didukung sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup.
	4.4.4	N/A	Tidak terdapat konflik selama periode satu tahun terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015).
4.5 Sedang (2)	4.5.1	sedang	PT BSN telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan berupa keberadaan dokumen PP, kebebasan berserikat bagi karyawan, dan kontrak kerja karyawan. Namun belum terbentuk lembaga bipartit.

	4.5.2	sedang	PT BSN telah merencanakan penyertaan pelatihan untuk karyawannya sebanyak 8 (delapan) jenis pelatihan dan telah terealisasi sebanyak 6 (enam) jenis (75 %).
	4.5.3	sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan (PP) namun belum lengkap dan jelas. Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya dalam pelatihan baik internal maupun eksternal sebagai upaya peningkatan kompetensi. Namun demikian belum diperoleh hasil penilaian kinerja karyawan seluruhnya.
	4.5.4	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Peraturan Perusahaan periode 2015-2017 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan telah diimplementasikan seluruhnya.

## 2.2. Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT. BSN telah memiliki dokumen perijinan yang lengkap dan sah berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/MENHUT-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan peta lampirannya. Berdasarkan Hasil Overlay Peta Lampiran SK Penetapan Batas IUPHHK HT Nomor : SK.473/MENHUT-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.936/Menhut-II/2013, tanggal 20 Desember 2013) menunjukkan bahwa areal IUPHHK-HTI PT. BSN telah sesuai sebagai kawasan hutan produksi.
			1.1.1 b	Memenuhi	IUPHHK-HT PT. BSN telah memenuhi kewajiban pembayaran luran IUPHHK pada tanggal 14 Mei 2004 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
			1.1.1.C	N/A	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	- Terdapat Revisi Rencana Kerja UPHHK-HTI untuk Jangka Waktu Sepuluh Tahun Periode 2009 – 2018 berdasarkan Surat Keputusan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
					<p>Nomor : SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKT Tahun 2014 IUPHHK-HT PT. BSN telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur Produksi/Perencanaan (Ir. Fairus Mulia) Nomor : 19/BSN-A.3/II/2014, tanggal 25 Februari 2014</li> <li>- Dokumen RKT Tahun 2015 IUPHHK-HT PT. BSN diajukan oleh Cuncun Hidayat, S.Hut (Asbid Perencanaan) dan telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur Utama (Rafli) Nomor : 95/BSN-A.3/RKT/XII /2014, tanggal 31 Desember 2014.</li> </ul>
			2.1.1 b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dan 2015 berupa Kawasan Konservasi Insitu dan sempadan sungai.</li> <li>- Penandaan batas dilapangan berupa pemasangan papan nama dan pemasangan pal batas serta penandaan batas berupa polet/cat merah pada batang pohon hidup.</li> </ul>
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta lampiran RKT Tahun 2014 dan RKT Tahun 2015 telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti keberadaannya di lapangan berupa papan nama dan patok batas.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Dokumen Rencana Kerja PT. BSN berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HT dan lampirannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014.
			2.2.1 b	N/A	IUPHHK-HTI PT. BSN dalam kegiatan pengelolaan hutannya telah memasuki daur ke 2 (dua) sehingga penyiapan lahan untuk areal yang ditanami tidak lagi ada areal berupa hutan alam, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai/ <b>NA (Not Aplicable)</b> .
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	<p>Seluruh kayu yang dipanen telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh Petugas Pembuat LHP dan telah disahkan oleh P2LHP yang berwenang.</p> <p>Dari hasil uji petik dokumen LHP dan Buku Ukur dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara kedua dokumen tersebut</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	IUPHHK-HTI PT. BSN melindungi kayu yang dikirim keluar areal kerja dengan dokumen FA-KB disertai dokumen DKBK sebagai lampirannya dan dokumen tersebut disahkan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh instansi yang berwenang.
		3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	IUPHHK-HTI PT. BSN adalah pemegang izin IUPHHK-HTI bukan IUPHHK-HA
			3.1.3 b	Memenuhi	Identitas pada kayu dicatat pada dokumen-dokumen tata usaha kayu yang berisi informasi yang sama.
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen FA-KB dan lampirannya telah disahkan oleh Ade Irma Suryani, yang telah ditetapkan sebagai Petugas Penerbit FA-KB di IUPHHK-HT PT. BSN.
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan telah sesuai dengan LHP yang disahkan oleh P2LHP (kelompok jenis, volume dan tarif).
			3.2.1 b	Memenuhi	SPP PSDH yang ditagihkan kepada IUPHHK-HT PT. BSN selama periode November 2014 – Oktober 2015 seluruhnya telah dibayar lunas dan nilainya telah sesuai.
			3.2.1 c	Memenuhi	Nilai Tarif SPP yang ditagihkan telah sesuai dengan PP. No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut No : P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014.
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	N/A	Tidak terdapat dokumen PKAPT dikarenakan IUPHHK-HTI PT. BSN tidak mengirim kayu keluar pulau
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Kapal pengangkut kayu yang digunakan oleh PT. BSN memiliki dokumen yang sah dan berbendera Indonesia.
	3.4.	3.4.1	3.4.1.1	N/A	PT. BSN belum menggunakan tanda V-Legal karena masih dalam tahap kontrak <i>Sub Licensi</i> dengan Lembaga Sertifikasi.
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	PT. BSN telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap yaitu dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan nomor SK : 660.1/56/KPDL-B, tanggal 08 April 2003.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL dan merupakan bagian dari dokumen AMDAL itu sendiri yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
					telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan nomor SK : 660.1/56/KPDL-B, tanggal 08 April 2003.
			4.1.2 b	Memenuhi	Implementasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terjadi dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode II (Juli – Desember 2014) dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode I (Januari – Juni 2015) IUPHHK-HT PT. BSN telah sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL dan RPL
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Terdapat Dokumen Prosedur dan Struktur Organisasi K3 PT. BSN dan Dokumen Pedoman Pelaksanaan K3 PT. BSN, serta terdapat implementasi K3 dilapangan.
			5.1.1.b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peralatan K3 di lokasi Camp dan lokasi bekerja dan berfungsi dengan baik.</li> <li>- Terdapat Klinik berikut mantrinya, serta terdapat prosedur penanganan korban kecelakaan.</li> </ul>
			5.1.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat catatan kecelakaan kerja perperiodik dan mekanisme penanganannya serta ada upaya menekan tingkat kecelakaan.</li> <li>- Selain itu sebagian karyawan bulanan telah diikutsertakan dalam program JAMSOSTEK.</li> </ul>
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat Peraturan Perusahaan (BAB IX pasal 44) yang isinya menyatakan kebebasan berserikat untuk karyawan oleh perusahaan.
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Bulan November 2014, tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur.</li> <li>- Terdapat Surat Peranjan Kerja Harian dalam Pasal 1 yang mencantumkan pernyataan bahwa pihak pekerja telah berumur 18 Tahun.</li> </ul>